

Polisi Modern dan Kejahatan Transnasional

Oleh : Novel Ali
Anggota Kompas

Masyarakat modern membutuhkan Polisi modern. Polisi modern akan menghadapi kejahatan transnasional yang lazim terjadi ditengah masyarakat modern. Itu disebabkan kejahatan transnasionalnya bisa eksis jika dilaksanakan dengan cara-cara modern, disertai pemanfaatan teknologi (kejahatan) super canggih alias teknologi modern.

BAGAIMANA mungkin Polisi ditengah masyarakat modern dapat mengejar kejahatan, kalau pelaku kejahatannya menggunakan kendaraan mobilitas tinggi, sementara Polisi masih mengayuh sepeda atau sepeda motor. Walaupun Polisi menggunakan kendaraan patroli, kendaraan bermotor yang dipakai pelaku kejahatan mempunyai kemampuan lari yang jauh lebih tinggi.

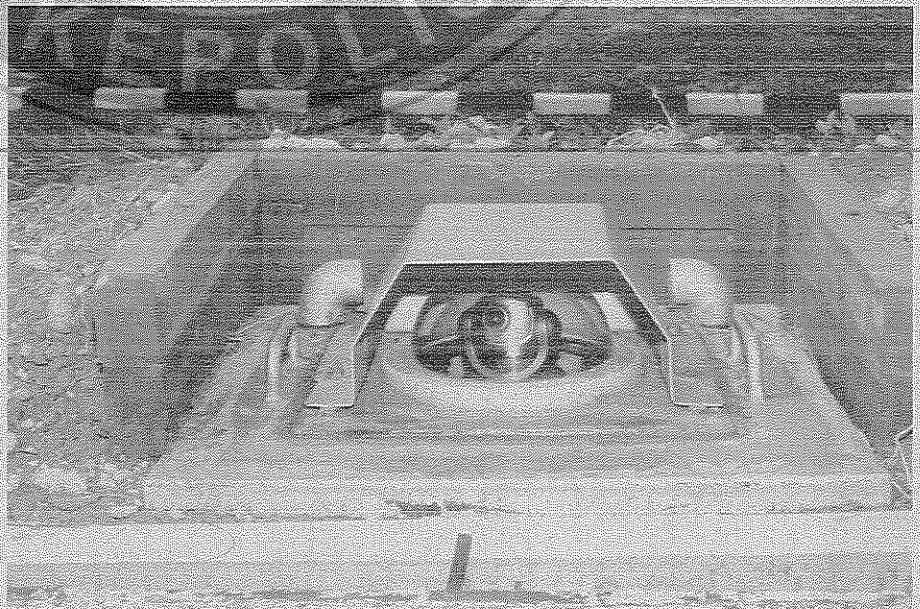
Polisi ditengah masyarakat modern butuh jasa pengangkutan, mulai yang bersifat tradisional maupun kendaraan bermotor. Dinegara modern sekalipun Polisi berkuda sering kita lihat aktifitasnya mengatur ketertiban demonstrasi yang dilakukan masyarakat tertentu. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pun masih banyak naik kuda atau mengayuh sepeda ketika melaksanakan tugas, walau Polri mempunyai sepeda motor, mobil, speedboat, helikopter atau lainnya, yang dapat digunakan sewaktu

dibutuhkan. Gambaran Polisi modern itulah yang diharapkan bangsa kita atas keberadaan dan kinerja Polri. Polri yang modern, merupakan prasyarat mutlak masa sekarang dan mendatang karena salah satu fungsi Polisi adalah crime hunter. Polisi itu

pengejar kejahatan sehingga terpanggil untuk selalu menyesuaikan diri dengan kuantitas dan kualitas kejahatan dizamannya.

Dimasa sekarang dan mendatang, kejahatan tradisional belum lenyap. Masih terlalu banyak kejahatan ditengah masyarakat yang menggunakan pola tradisional, seperti mencuri kemudian melarikan diri (tanpa menggunakan kendaraan apapun alias berlari). Selanjutnya bersembunyi dirumah teman, karena Polisi akan mudah mencarinya jika bersembunyi dirumah istri/suami, anak, atau orangtua. Bentuk-bentuk kejahatan tradisional lain pun masih tetap eksis, sebagaimana berlaku di era kejahatan modern, sekaligus transnasional. Karenanya, Polri perlu memiliki dan sekaligus mampu menggunakan peralatan modern, manajemennya berorientasi target, organisasi rapih dan kualitas personelnya.

Kita tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin Polisi kita bisa mencegah, mengejar dan menindak pelaku kejahatan modern tanpa dibarengi ketersediaan hardware, software dan brainware sebagaimana mestinya. Jika piranti kuat yang dimiliki aparat keamanan kita jauh tertinggal dibandingkan yang dimiliki dan digunakan pelaku kejahatan, maka



Kamera Pengintai, salah satu alat yang dimiliki oleh Polri di Platina.



Komputer pengendali robot untuk menjikan bom.

kejahatan akan sering terjadi." Selain itu, piranti lunak peraturan perundangan, kemauan politik pemerintah, sistem nilai dan norma publik harus bersifat akomodatif dalam pemenuhan kebutuhan objektif Polri, sesuai tuntutan zamannya. Namun, meski piranti kuat dan lunak yang dibutuhkan Polri sudah disediakan Negara (pemerintah), kalau diimbangi *brainware* yang memadai, tidak pernah akan membawa kemanusiaan yang bersifat Universal.

Disitulah arti penting kualitas pendidikan, pelatihan dan kejuruan bagi setiap anggota Polri. Kalau perilaku oknum Polisi menyakitkan hati warga masyarakat masih terjadi ditengah kehidupan rill publik, omong kosong modernisasi Polri bisa membawa manfaat. Karena itu Polri yang modern harus mengisyaratkan landasan moralitas tinggi dari seluruh anggotanya. Moralitas tersebut harus mengiringi pemanfaatan teknologi tinggi, manajemen pelayanan prima, dan orientasi pengabdian yang terbebas dari keberpihakan kepada kepentingan apapun, kecuali kepentingan Negara dan masyarakat.

Semua itu, akan mendorong tidak lamban bertindak, sejak tahap prediksi, antisipasi dan pencegahan

"Polri akan selalu berhadapan dengan bentuk-bentuk kejahatan aktual ditengah masyarakat, mikro dan makro, karena itu Polri tidak boleh menutup mata atas kejahatan transnasional yang beraneka ragam bentuknya. Antara lain, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lainnya".

sampai tindakan konkret (penanganan) dan pemberian sanksi hukum bagi tindak pelaku kriminal atau bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan lainnya. Apapun alasannya, polisi kita tidak boleh terlambat bergerak. Jangan sampai terdengar keluhan mereka terlambat mengejar pencuri sepeda motor atau mobil, karena kendaraan bermotor miliknya tidak ada bensinnya. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kendaraan bermotor polri harus selalu siap

pakai. Bensin yang penuh, bannya yang tidak gundul, mesinnya siap mengantar pemakainya kesasaran yang dituju.

Polri akan selalu berhadapan dengan bentuk-bentuk kejahatan aktual ditengah masyarakat, mikro dan makro, karena itu Polri tidak boleh menutup mata atas kejahatan transnasional yang beraneka ragam bentuknya. Antara lain, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lainnya.

Konsekuensinya Polri harus siap menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern, terutama dalam konteks menghadapi kejahatan transnasional dan bentuk-bentuk kejahatan modern lainnya yang terjadi dinegara kita. Konsekuensi ini memprasyaratkan kemandirian Polri. Dalam arti aparat Kepolisian kita tidak boleh membiarkan dirinya menjadi alat kekuasaan dan alat politik dari kekuatan tertentu dinegeri ini. Baik kekuatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif maupun segmen masyarakat tertentu. Tuntunan itu mengharuskan Polri harus berada diposisi terdepan dalam kerangka penegakan supermasi hukum di negeri ini. Bagi Polri, sebagai lembaga Polisi modern di Indonesia, nuansa hukum harus jauh lebih solid dibanding lainnya. Bahkan, seharusnya Polri menepis semua bentuk intervensi politik dan kekuasaan yang bertentangan dengan profesinya.

Kearah itu pulalah salah satu manfaat dari keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS). Sesuai tugas dan kewenangannya yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan Presiden (PP) No 17 tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Lembaga itu berupaya mewujudkan Polri yang modern, yaitu Polri professional dan mandiri dan di back up moralitas anggotanya sebagaimana harapan dengan tuntunan masyarakat. ***